



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMBELAJARAN PKn DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS XI IPS SMAN 6 KOTA BENGKULU

Rahmat Angga Samudera¹, Elfahmi Lubis²

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Kampus 1 Jalan Bali 1 Kota Bengkulu 38119 Telp, (0736)22765

Email: fkipkn@umb.ac.id, rahmatangga600@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 1). Manfaat Teoritis. Bagi peneliti, Bagi sekolah. 2). Manfaat Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi tentang Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PPKn dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Selain itu penelitian ini juga memberikan manfaat yang baik dalam bidang mendidikan menjadi sumber ide atau referensi bagi siswa. Dalam pengumpulan data penelitian ini di lakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan teknik penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh 1). pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. 2). siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social Masyarakat. 3). Hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengajar topik-topik politik dengan baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PKn Dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas XI IPS SMAN 6 Kota Bengkulu sudah terlaksanakan dengan cukup baik.

Kata kunci: Implementasi. Pendidikan Politik, kompetensi.

Abstract

This research aims to determine political education through Civics learning in developing civic competence in class XI IPS students at SMA Negeri 6 Bengkulu City. This type of research is qualitative research. The benefits of this research are: 1). Theoretical Benefits. For researchers, for schools. 2). Practical Benefits. Practically, this research is expected to be a reference for Political Education through PPKn Learning in Explaining Citizenship Information Competencies in class XI IPS students at SMA Negeri 6 Bengkulu City. Apart from that, this research also provides good benefits in the field of education as a source of ideas or references for students. Data collection for this research was carried out using observation, interviews and documentation techniques, while data analysis used data presentation techniques, data reduction and drawing conclusions. The research results obtained 1). a deep understanding of the political system, democratic values, the rights and responsibilities of citizens, as well as the skills necessary to actively participate in the political process. 2). students can participate directly in the political process at school and meet the needs of the social community. 3). Barriers to implementing political education in Civics learning can come from several factors, such as a curriculum that lacks depth in political material, limited resources such as books and relevant learning materials, and a lack of training for teachers to teach political topics well. The conclusion from the results of this research shows that the implementation of Political Education through Civics Learning in Explaining Civic Competencies for Class XI IPS Students at SMAN 6 Bengkulu City has been implemented quite well.

Keywords: Implementation. Political Education, competence.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, karakter dan keterampilan individu yang diatur dalam satuan kurikulum yang terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan secara nasional. Kurikulum dalam Pendidikan harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan sosial masyarakat yang Sebagian besar dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Aydin, Ozfidan, & Carothers (2017) bahwa tantangan dan hambatan yang spesifik harus dikembangkan untuk pendidik dalam pembuat kebijakan agar membantu dalam memenuhi setiap tantangan terutama dalam penggunaan teknologi mempersiapkan siswa siap untuk dapat menggunakan teknologi.

Sebagaimana yang diungkapkan St. John-Matthews, Robinson, Martin, Newton, & Grant (2020) yang menyatakan bahwa desain kurikulum merupakan aspek penting dari pendidikan termasuk siswa yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh kurikulum. Pendidikan politik tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan kewarganegaraan. Partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik yang berpusat pada kader partai

dan masyarakat dengan penekanan konten pada hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah mengacu pada beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan politik bagi pelajar SMA di Indonesia pada hakikatnya adalah tentang membelajarkan agar menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia. Dalam hal ini Hidayah, Suyitno, & Retnasari (2019) berpendapat bahwa jika dibandingkan, pada jenjang Sekolah Dasar karakteristik perkembangannya menampilkan perbedaan karena pada usia ini berada ada tahap perkembangan. Dalam era globalisasi, pendidikan politik bagi pelajar SMA dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka sebagai generasi bangsa sehingga dapat menjadikan Indonesia dapat lebih baik dibidang politik mendatang. Halking (2018) menjelaskan jika dimensi Pendidikan politik bagi pelajar SMA di Indonesia diselaraskan dengan aspek-aspek Pendidikan yang memperhatikan beberapa aspek baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Berdasarkan observasi awal pada desember 2023 di sekolah SMA Negeri 06 Kota Bengkulu kepada waka kurikulum beserta guru PKn , peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwa siswa disekolah SMA Negeri 6 Bengkulu masih memiliki tingkat pemahaman tentang politik yang kurang karena siswa disana hanya mengetahui sedikit tentang politik seperti pemilihan ketua osis dan ketua kelas sehingga implementasi pendidikan politik ini sangat penting di pelajari dan di terapkan karena pendidikan politik dirasakan sebagai upaya membentuk siswa agar memiliki kesadaran serta mampu respon terhadap keadaan sosial masyarakatnya. Sebagaimana siswa tersebut mengimplementasikan di kehidupan masyarakat seperti bergotong royong kebersihan wilayah tempat tinggal dengan bekerja sama mengajak perangkat desa, serta berkolaborasi mengadakan kegiatan bersama RISMA, dan atau karang taruna. Maka melalui pendidikan politik, disiapkan untuk mampu memahami kondisi bangsa serta mampu dan mau untuk bertindak ke arah perubahan dengan dasar tanggung jawab yang berlandaskan nilai Islam dan Indonesia. Maka jelas nyatanya pendidikan politik ini menciptakan yang mampu dan mau bertindak dalam kehidupan negara dengan dilandasi sikap tanggung jawab terhadap negara. Penyelenggaraan pendidikan politik harus menyentuh tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Hal ini menjadi alasan penyelenggaraan pendidikan politik berdasar pada kurikulum pendidikan politik ini sepenuhnya lengkap menyentuh semua aspek seperti yang telah terkandung pada esensi

pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Bajak, kecamatan Teluk Segara, Provinsi Bengkulu yaitu di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: a. Data Primer, yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti kepala sekolah, guru kelas, murid dan pemilik kantin yang berada di lingkungan sekolah. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu: Waka kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru PKn, siswa/siswi kelas XI IPS. Teknik pengumpulan Data yaitu : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah SMA Negeri 06 Kota Bengkulu

SMA Negeri 6 ini pertama kali didirikan oleh bapak Drs. Murdianto dengan nama SMA Negeri 5 yang dipimpin oleh bapak Drs. Murdiono. Waktu itu SMA Negeri 5 ini belum punya gedung sendiri, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, SMA Negeri 5 masih gabung dengan SMA 2 di Jalan Mahoni. Kemudian nama SMA Negeri 5 berubah menjadi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu pada tahun 1990. Dari tahun itu sampe sekarang SMA 6 Kota Bengkulu telah terjadi pergantian Kepala Sekolah dan Kepala SMA 6 Kota Bengkulu sekarang adalah Eka Saputra, M.Pd.

SMA Negeri 6 Kota Bengkulu merupakan salah satu sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka dan juga sekarang sudah menerapkan sekolah yang berbasis full day.

2. Identitas SMA Negeri 06 KOTA Bengkulu

- 1) Nama Sekolah : SMA Negeri 06 Kota Bengkulu
- 2) NPSN : 10702406
- 3) Jenjang Pendidikan : SMA

- 4) Setatus Sekolah : Negeri
- 5) Akreditasi : A
- 6) Alamat Sekolah :
- Jalan : Pratu Aidit Kel. Bajak No. 23
- Kecamatan : Teluk Sagara
- Kabupaten/Kota : Bengkulu
- Provinsi : Bengkulu
- Kode pos : 38118
- 7) Kontak Sekolah :
- Nomor telpon : (07360)-26690
- Email : sman6bengkulu@yahoo.co.id

3. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 06 Kota Bengkulu

a. Visi SMA Negeri 06 Kota Bengkulu

Ialah “Terwujudnya generasi unggul, kreatif inovatif, peduli dengan lingkungan, tanggap terhadap segala tantangan dan bencana yang dilandasi Iman dan Taqwa”.

b. Misi SMA Negeri 06 Kota Bengkulu

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif-efesien dengan memperdayakan seluruh komponen sekolah.
2. Mengoptimalkan kegiatan keagamaan di sekolah dalam tataran amalan praktis dan sikap prilaku.
3. Menciptakan situasi sekolah yang kondusif untuk pengembangan kreatifitas dan inovasi peserta didik.
4. Mewujudkan sekolah yang memiliki budaya kompetitif, cinta lingkungan, religius dan berprestasi dibidang akademik maupun non akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga sekolah terhadap mitigasi bencana.
6. Membentuk warga sekolah yang peduli dan siap membantu sesama dalam menghadapi tantangan dan menanggulangi bencana.

B. Hasil penelitian

a. Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam Mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Politik dan Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang demokratis. Ini memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman individu tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pendidikan politik juga membantu membangun kesadaran akan hak-hak dan kewajiban warga negara serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik yang relevan.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

”Yang bapak ketahui dari politik yaitu proses dan aktivitas yang terkait dengan pengaturan atau pemerintahan suatu negara atau wilayah, termasuk segala yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang berbeda. Disekolah ini politik berupa pemilihan ketua kelas. Sedangkan pendidikan politik adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang sistem politik, proses politik, nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan. ”(Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruangan Guru).(W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa guru sudah mengetahui politik dan pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari cara guru menjelaskan bahwa politik Politik di sekolah ini melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta distribusi dan penggunaan

kekuasaan dalam suatu Masyarakat disekolah. Ini mencakup beragam aktivitas mulai dari pemilihan ketua kelas hingga ketua osis, dan sangat mempengaruhi cara berinteraksi siswa satu sama lain.

2. Pendidikan politik dalam mengembangkan kompetensi siswa.

Pendidikan politik adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang sistem politik, proses politik, nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan untuk menjadi warga negara yang aktif, berpartisipasi dalam proses politik, dan membuat keputusan yang informan dalam kehidupan demokratis.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

” Pendidikan politik mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses demokrasi. Mereka belajar pentingnya suara mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat, misalnya melalui pemungutan suara, partisipasi dalam organisasi masyarakat, atau advokasi isu-isu penting. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab, tetapi juga memperkaya kemampuan pribadi mereka dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat.”(Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruang Guru).(W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan temuan dari wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai pendidikan politik dalam mengembangkan kompetensi siswa juga dapat membantu membangun kesadaran akan hak-hak dan kewajiban warga negara serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik yang relevan. Ini mencakup pembelajaran tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, isu-isu politik, dan cara-cara untuk memengaruhi perubahan dalam masyarakat.

b. Bentuk Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki beberapa bentuk, termasuk pembelajaran konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, pemahaman terhadap sistem pemerintahan, partisipasi dalam proses politik, serta keterampilan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu politik. Ini membantu siswa memahami peran mereka dalam masyarakat dan mengembangkan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

“Bentuk-bentuk pendidikan politik disekolah ini melibatkan pembelajaran Pkn yang mencakup tentang sistem politik, sejarah politik, dan hak-hak warga negara di sekolah. Acara-acarayang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang proses politik, keterampilan kepemimpinan, dan partisipasi dalam demokrasi kepada masyarakat umum. Melibatkan pendidikan tentang bagaimana menafsirkan informasi politik yang ditemukan dalam media dan mengidentifikasi berita palsu atau bias. Termasuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua osis, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social masyarakat.”(Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruang Guru).(W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk pendidikan politik ini yang mencakup tentang sistem politik, sejarah politik, dan hak-hak warga negara di sekolah. Melibatkan pendidikan tentang bagaimana menafsirkan informasi politik yang

ditemukan dalam media dan mengidentifikasi berita palsu atau bias. Termasuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua osis, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social masyarakat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Politik

Pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dapat dijelaskan sebagai proses di mana siswa diberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses politik yang terjadi di negara mereka.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

“Pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan upaya sistematis untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses politik dalam suatu negara. Ini melibatkan pembelajaran tentang struktur pemerintahan, peran lembaga-lembaga politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik.”(Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruang Guru).(W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn merupakan upaya sistematis untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses politik dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang bertanggung jawab, berpikiran terbuka, dan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. kegiatan pembelajaran pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilihan umum, penugasan proyek umum seperti pemilihan ketua kelas dan pemilihan osis.

c. Hambatan dalam implementasi Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Hambatan

Beberapa kendala dalam implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa antara lain kurikulum yang kurang mendukung, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyampaian materi, serta rendahnya motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran politik. Selain itu, adanya resistensi dari beberapa pihak yang menganggap pendidikan politik sebagai sesuatu yang sensitif atau kontroversial juga.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

”Hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengajar topik-topik politik dengan baik. Selain itu, ada juga potensi konflik ideologis di antara guru, siswa, dan pihak lain dalam menyampaikan materi politik.”(Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruang Guru).(W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk

mengajar topik-topik politik dengan baik. Selain itu, ada juga potensi konflik ideologis di antara guru, siswa, dan pihak lain dalam menyampaikan materi politik.

2. Pengetahuan politik di dalam pendidikan PKn dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa. Melalui pembelajaran PKn, siswa diharapkan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pengetahuan politik dalam pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat berperan dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Raminzar, S.Pd., M.TPd diperoleh data berikut:

”Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan siswa dengan memberikan pengetahuan politik yang esensial. Dengan mengintegrasikan pengetahuan politik dalam pendidikan PKn, siswa tidak hanya menjadi lebih paham tentang sistem politik dan proses pemerintahan, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini membantu mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” (Senin, 17/04/2024, 09:00 WIB, Ruang Guru). (W/ Raminzar, S.Pd., M.TPd. Guru PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu).

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan siswa dengan memberikan pengetahuan politik yang esensial. Dengan mengintegrasikan pengetahuan

politik dalam pendidikan PKn, siswa tidak hanya menjadi lebih paham tentang sistem politik dan proses pemerintahan, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini membantu mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Pembahasan

a. Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Politik dan Pendidikan Politik

Pengetahuan guru tentang politik dan Pendidikan politik di SMA 06 Kota Bengkulu, Bahwa guru di sekolah ini sudah mengetahui politik dan pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari cara guru menjelaskan bahwa politik di sekolah ini melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam suatu masyarakat disekolah. Ini mencakup beragam aktivitas mulai dari pemilihan ketua kelas hingga ketua osis, dan sangat mempengaruhi cara berinteraksi siswa satu sama lain. Pendidikan politik merupakan proses di mana individu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. di mana berbagai kepentingan dan nilai saling bertabrakan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan proses pembuatan keputusan, pembentukan kebijakan, serta distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Politik sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan historis dari suatu konteks tertentu.

2. Pendidikan politik dalam mengembangkan kompetensi siswa

Berdasarkan temuan dari wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai pendidikan politik dalam mengembangkan kompetensi siswa juga dapat membantu membangun kesadaran akan hak-hak dan kewajiban warga negara serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

isu-isu politik yang relevan. Ini mencakup pembelajaran tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, isu-isu politik, dan cara-cara untuk memengaruhi perubahan dalam masyarakat.

b. Bentuk Pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Bentuk Pendidikan Politik

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk pendidikan politik ini yang mencakup tentang sistem politik, sejarah politik, dan hak-hak warga negara di sekolah. Acara-acara yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang proses politik, keterampilan kepemimpinan, dan partisipasi dalam demokrasi kepada masyarakat umum. Melibatkan pendidikan tentang bagaimana menafsirkan informasi politik yang ditemukan dalam media dan mengidentifikasi berita palsu atau bias. Termasuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua osis, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah ini mencakup tentang sistem politik, sejarah politik, dan hak-hak warga negara di sekolah. Termasuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua osis, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social Masyarakat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Politik

Hal ini berdasarkan dengan teori pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan politik melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan bahwa peserta didik memahami dan terlibat dalam proses politik secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan politik: 1. Perencanaan Kurikulum 2. Metode Partisipasi Aktif. 3. Kolaborasi dengan Pihak Luar 4. Evaluasi dan Refleksi. 5. Kegiatan Ekstrakurikuler 6. Pembelajaran Kontekstual.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dengan kegiatan pembelajaran pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilihan umum, penugasan proyek umum seperti pemilihan ketua kelas dan pemilihan osis.

c. Hambatan dalam implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Bengkulu.

1. Hambatan

Berdasarkan temuan wawancara tentang hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengajar topik-topik politik dengan baik. Selain itu, ada juga potensi konflik ideologis di antara guru, siswa, dan pihak lain dalam menyampaikan materi politik.

Hal ini berdasarkan dengan teori Beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya dalam materi pendidikan politik adalah:

- a) Keterbatasan Sumber Daya.
- b) Kurangnya Minat dan Motivasi.
- c) Kontroversi Politik
- d) Pengajar yang Kurang Memadai

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengajar topik-topik politik dengan baik.

2. Pengetahuan politik di dalam pendidikan PKn dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan pada siswa

Berdasarkan temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kewarganegaraan siswa dengan memberikan pengetahuan politik yang esensial. Dengan mengintegrasikan pengetahuan politik dalam pendidikan PKn, siswa tidak hanya menjadi lebih paham tentang sistem politik dan proses pemerintahan, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini membantu mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan dengan pendekatan yang komprehensif dan beragam, pendidikan politik dapat membantu siswa memahami dinamika politik, meningkatkan kesadaran kritis, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan politik merupakan proses di mana individu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah ini mencakup tentang sistem politik, sejarah politik, dan hak-hak warga negara di sekolah. Termasuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua osis, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di sekolah dan memenuhi kebutuhan social Masyarakat. Hambatan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kurikulum yang kurang mendalam dalam materi politik, keterbatasan sumber daya seperti buku dan materi pembelajaran yang relevan, serta kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengajar topik-topik politik dengan baik.

Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis memiliki beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Kepada Guru Mata Pelajaran PKn

Penulis menyarankan agar guru mata pelajaran PKn di SMA Negeri 06 Kota Bengkulu terus memberikan materi tentang pendidikan politik yang lebih luas kepada siswa mereka secara konsisten.

2. Kepada Siswa SMA Negeri 06 Kota Bengkulu

Siswa harus lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar tentang pendidikan politik, terutama dalam mata pelajaran PKn. Mereka juga harus memahami betapa pentingnya mendapatkan pemahaman tentang pendidikan politik.

3. Kepada Pihak Sekolah

Sekolah (SMA Negeri 06 Kota Bengkulu) harus berfungsi sebagai wadah dan fasilitator yang baik bagi guru dan siswa mata pelajaran PPKn untuk memberikan pendidikan politik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan Proposal ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs, Santoso, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
2. Bapak Elfahmi Lubis, SH, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
3. Bapak Elfahmi Lubis, SH, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing,
4. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
5. Pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan meminjamkan buku,
6. Bapak, ibu serta keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang nasehat, do'a dan dukungan kepada penulis,
7. Sahabat, teman-teman dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu dengan rendah hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis mengharapkan semoga Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membacanya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian Pendidikan. Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Ilam*, 2(1), 1-8.
- Aydin, H., Ozfidan, B., & Carothers, D. (2017). Meeting the Challenges of Curriculum and Instruction in School Settings in the United States. *Journal of Social Studies Education Research*.
- Crisp, R. (2014). *Aristotle: Nicomachean Ethics*. Cambridge University Press.
- Halking. (2018). Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang Smart and Good Citizenship.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017)
- Febrianti Nurul, M.Pd (2020). Universitas Esa Unggul. *Jurnal Kompetensi Kewarganegaraan*.
- Hidayah, Y., Suyitno, & Retnasari, L. (2019). Analisis Kemampuan Resolusi Konflik Siswa Sekolah Dasar. (*JKPD*) *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 4(1).
- Hudha, M. N., Triwahyuningtyas, D., Rafikayati, A., Fajaruddin, S., Maryani, I., Widiaty, I., ... Permanasari, A. (2019). How is STEM learning for children with special needs in Indonesia? In *4th Annual Applied Science and Engineering Conference*.
- Hysing, E. (2015). Citizen participation or representative government – Building legitimacy for the Gothenburg congestion tax. *Transport Policy*, 39, 1–8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1991). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Balai Pustaka
- Karliani, E., Kartadinata, S., Winataputra, U. S., & Komalasari, K. (2019). Indonesian civic engagement among college students. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(5), 582–592.
- Kurniadi, B. (2019). *Indonesia Political Development : Democracy , Political Parties in the Political Education Perspective*. 66–70.
- Lee, S., & Xenos, M. (2019). Social distraction? Social media use and political knowledge in two U.S. Presidential elections. *Computers in Human Behavior*, 90, 18–25.

- Leonhard, L., Karnowski, V., & Kümpel, A. S. (2020). Online and (the feeling of being) informed: Online news usage patterns and their relation to subjective and objective political knowledge. *Computers in Human Behavior*, *103*, 181–189.
- Maemonah. (2012). Aspek-aspek dalam pendidikan karakter. *FORUM TARBIYAH*, *10*(1).
- Marsudi, S. Al. (2006). *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mcdougald, J. (2018). CLIL across the Curriculum, benefits that go beyond the classroom. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, *11*, 9–18. <https://doi.org/10.5294/laclil.2018.11.1.1>
- Memoli, V. (2011). How Does Political Knowledge Shape Support for Democracy? Some Research Based on the Italian Case. *Bulletin of Italian Politics*, *3*(1).
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, *1*(1), 24–44.
- Pastarmadzhieva, D. (2015). Political knowledge: Theoretical formulations and practical implementation, *13*, 16–21.
- Raharjo. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu Di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *23*(2), 175–198.
- St. John-Matthews, J., Robinson, L., Martin, F., Newton, P. M., & Grant, A. J. (2020). Crowdsourcing: A novel tool to elicit the student voice in the curriculum design process for an undergraduate diagnostic radiography degree programme. *Radiography*.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bahasa (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CVAlfabeta.